



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jl. Tuanku Tambusai Komplek Perkantoran Walikota Dumai – Bagan Besar  
**DUMAI**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DUMAI

NOMOR 56 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PETA PROSES BISNIS PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan struktur organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses;
  - b. bahwa untuk ketertiban penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, berdayaguna dan berhasil guna, serta meningkatkan kualitas dan kinerja yang terukur dalam pelayanan publik, perlu disusun peta proses bisnis di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

7. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 411);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 181);
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D)
13. Peraturan Walikota Dumai Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 26 seri D);
14. Peraturan Wali kota Dumai Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 28 Seri E).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN PETA PROSES BISNIS.
- KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, merupakan bagan yang digunakan untuk mengidentifikasi secara jelas alur yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses bisnis di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai.
- KETIGA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi dasar dan pedoman dan menjadi dasar dan pedoman untuk menyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan (SOP AP) di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 20 September 2023

The image shows a blue circular official stamp. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KOTA" at the top and "DUMAI" at the bottom, separated by two stars. Inside the ring, the text "BAPPEDALITBANG" is written across the center. A blue ink signature is written over the stamp. To the right of the stamp, the text "WALIKOTA DUMAI" and "KEPALA," is printed. Below the stamp, the name "Dr. BUDI HASNUL, M.Si" and the NIP number "Nip. 197402131993031002" are printed.

WALIKOTA DUMAI  
KEPALA,  
Dr. BUDI HASNUL, M.Si  
Nip. 197402131993031002

Lampiran Keputusan Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota  
Dumai  
Nomor : 56 Tahun 2023  
Tanggal : 20 September 2023

**I. MISI, TUJUAN DAN SASARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DUMAI**

No.	MISI	TUJUAN	SASARAN	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	1. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Kota Dumai	1. Terwujudnya konsistensi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah serta efektivitas pembangunan Daerah	BAPPEDALITBANG
		2. Meningkatkan hasil kelitbangan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik	2. Meningkatkan hasil kelitbangan didalam kebijakan perencanaan pembangunan daerah	BAPPEDALITBANG

## II. PROSES DAN SUB PROSES BISNIS

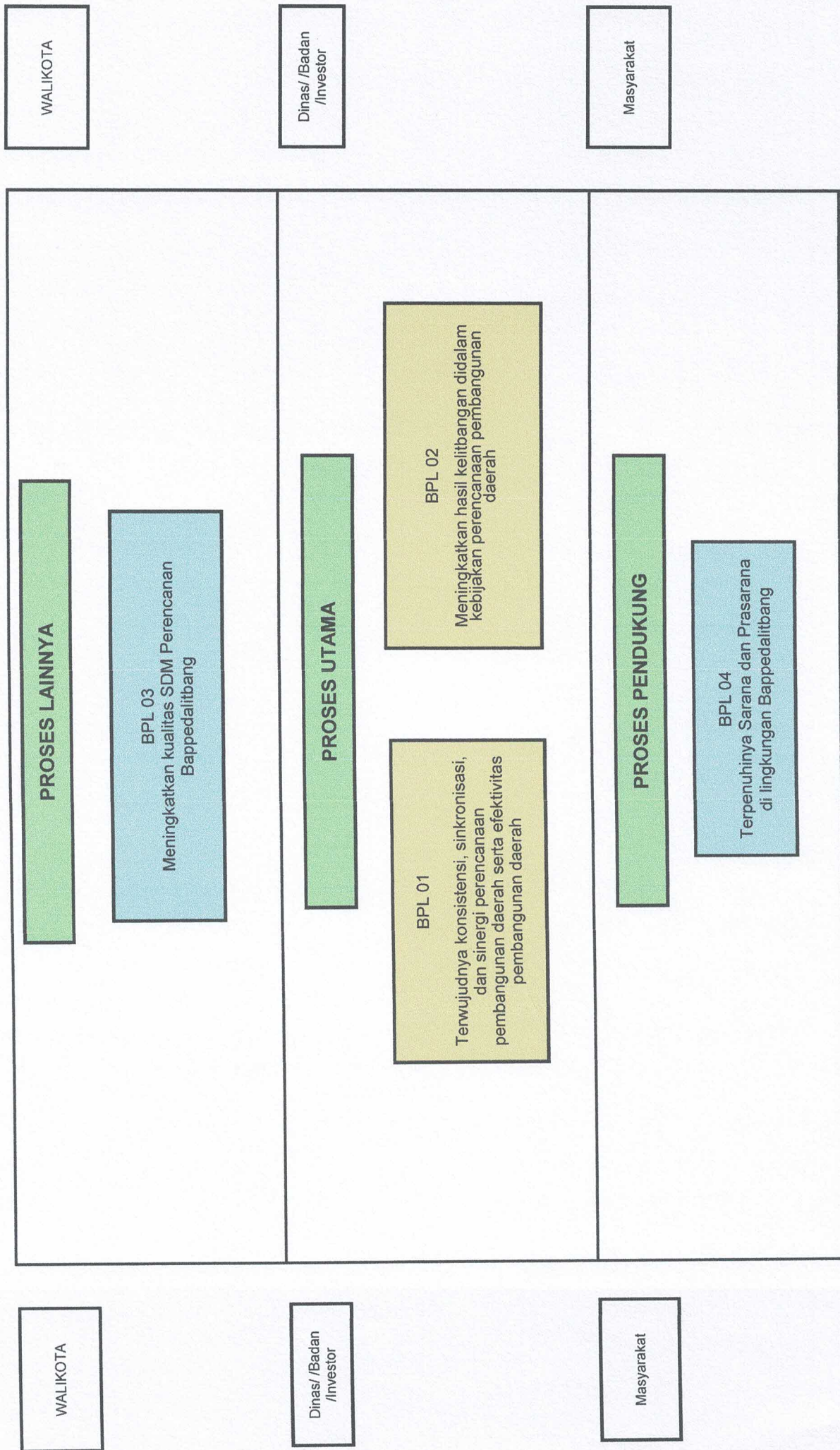
PROSES BISNIS/Sasaran	SUB PROSES BISNIS /Strategi		Peta Lintas Fungsi / Arah Kebijakan / Kegiatan (pilih "Arah Kebijakan" saja atau "Kegiatan" saja)	OPD PENANGGUNG JAWAB
	Kode	Kode		
	2		3	4
	1			
	PROSES UTAMA			
BPL 01	Terwujudnya konsistensi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah serta efektivitas pembangunan daerah	BPL 01.01	Mewujudkan perencanaan yang Efektif dan Efisien	BPL 01.01.01
			Peningkatan partisipasi stakeholder dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, applicable dan accountable;	
			Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai feedback perencanaan pembangunan daerah;	BPL 01.01.02
			Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan daerah dalam segala tingkatan pemerintahan.	BPL 01.01.03
BPL 02	Meningkatkan hasil kelibangan didalam kebijakan perencanaan pembangunan daerah	BPL 02.01	Mewujudkan hasil kelitbangan dan meningkatkan inovasi daerah dalam mendukung pembangunan daerah	BPL 02.01.01
			Penerapan hasil kelitbangan dan inovasi daerah dalam setiap aspek pembangunan daerah	
BPL 03	Meningkatkan kualitas SDM Perencanaan Bappedalitbang	BPL 03.01	Mewujudkan Perencana yang berkualitas dan berdaya saing tinggi	BPL 03.01.01
			Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana	
			Pemenuhan Gaji dan Tunjangan Perencana	BPL 03.01.02
			Peningkatan kesehatan Jasmani dan Rohani Perencana	BPL 03.01.03
				BAPPEDALITBANG

PROSES BISNIS/Sasaran		SUB PROSES BISNIS /Strategi		Peta Lintas Fungsi / Arah Kebijakan / Kegiatan (pilih "Arah Kebijakan" saja atau "Kegiatan" saja)	OPD PENANGGUNG JAWAB
BPL 04	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana di lingkungan Bappedalitbang	1		3	4
		2			
		BPL 04.01	Mewujudkan terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana yang mendukung kinerja di Bappedalitbang		
				BPL 04.01.01	Pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan
				BPL 04.01.02	Pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan
				BPL 04.01.03	

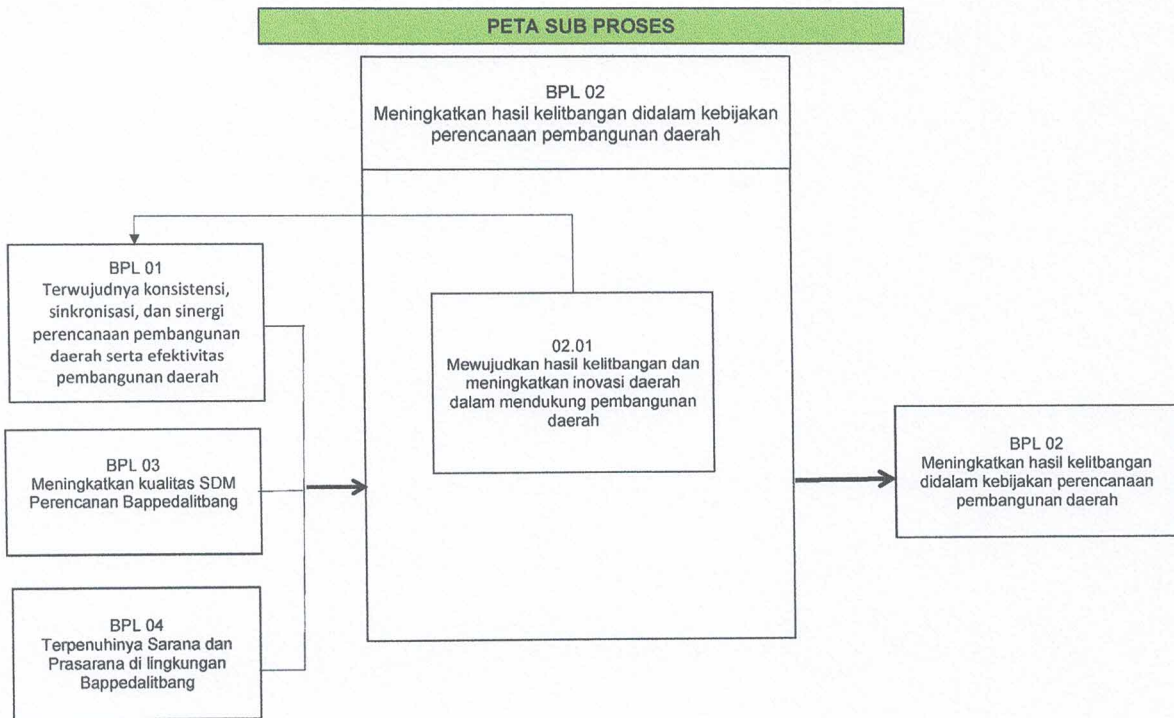
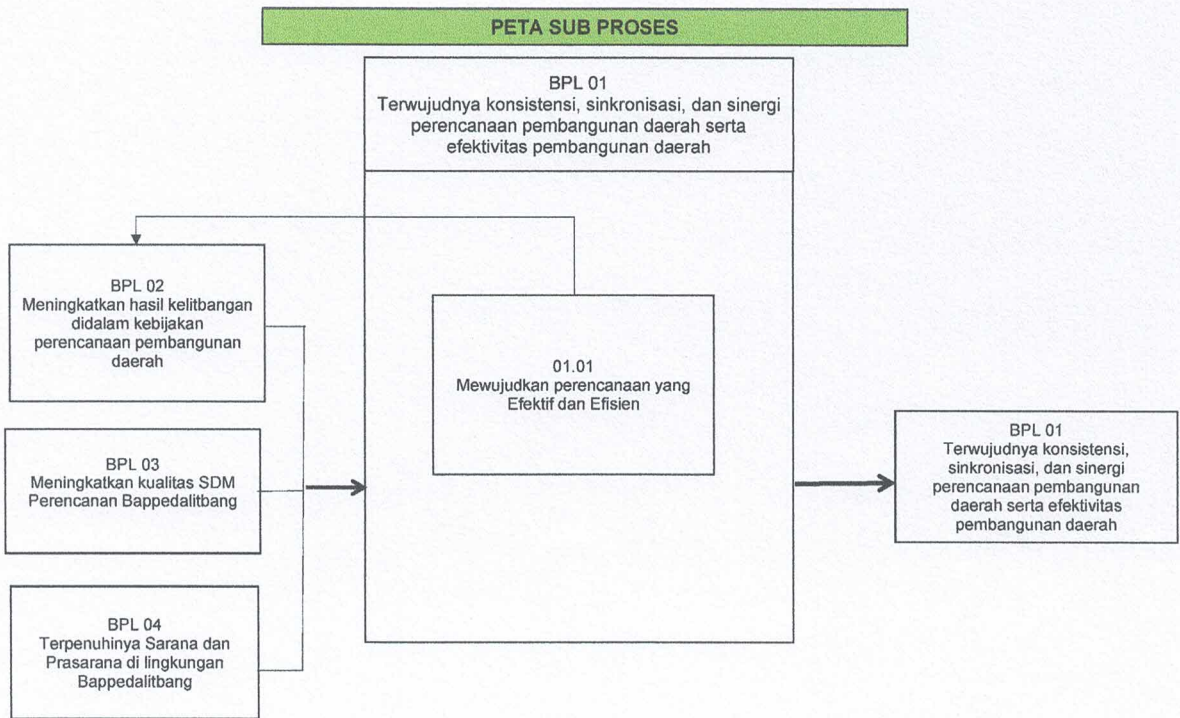
**TABEL PROSES BISNIS PADA PETA PROSES BISNIS**

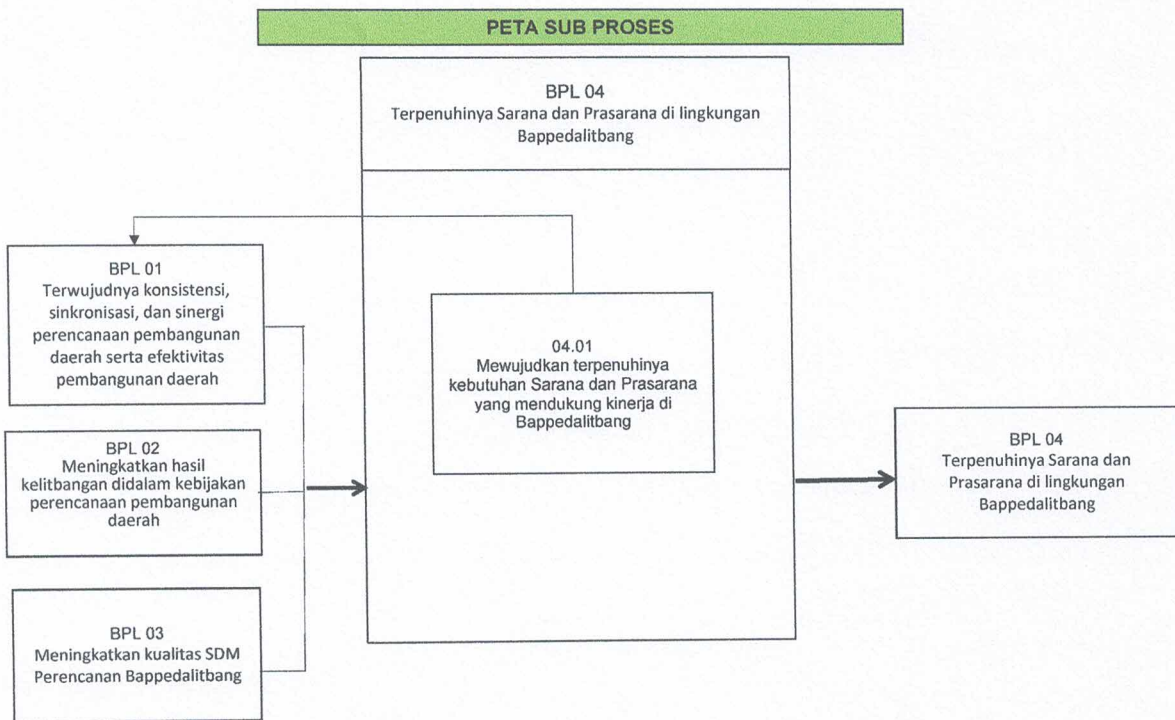
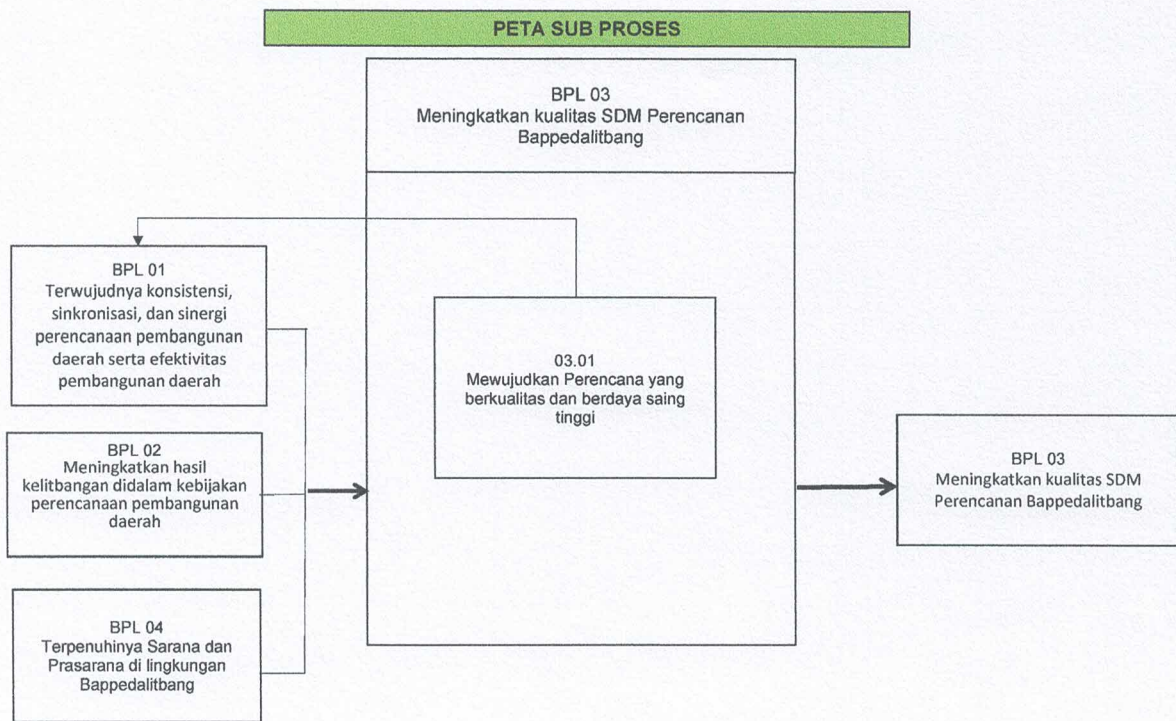
<b>PROSES BISNIS</b>			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>No</b>	<b>Proses /SASARAN</b>	<b>Jenis Proses</b>	<b>Kode</b>
1	Terwujudnya konsistensi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah serta efektivitas pembangunan daerah	Utama	KPR 01
2	Meningkatkan hasil kelitbangan didalam kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Utama	KPR 02
3	Meningkatkan kualitas SDM Perencanaan Bappedalitbang	Lainnya	KPR 03
4	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana di lingkungan Bappedalitbang	Pendukung	KPR 04

# PETA PROSES BISNIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



TABEL PETA SUB PROSES PADA PETA PROSES BISNIS





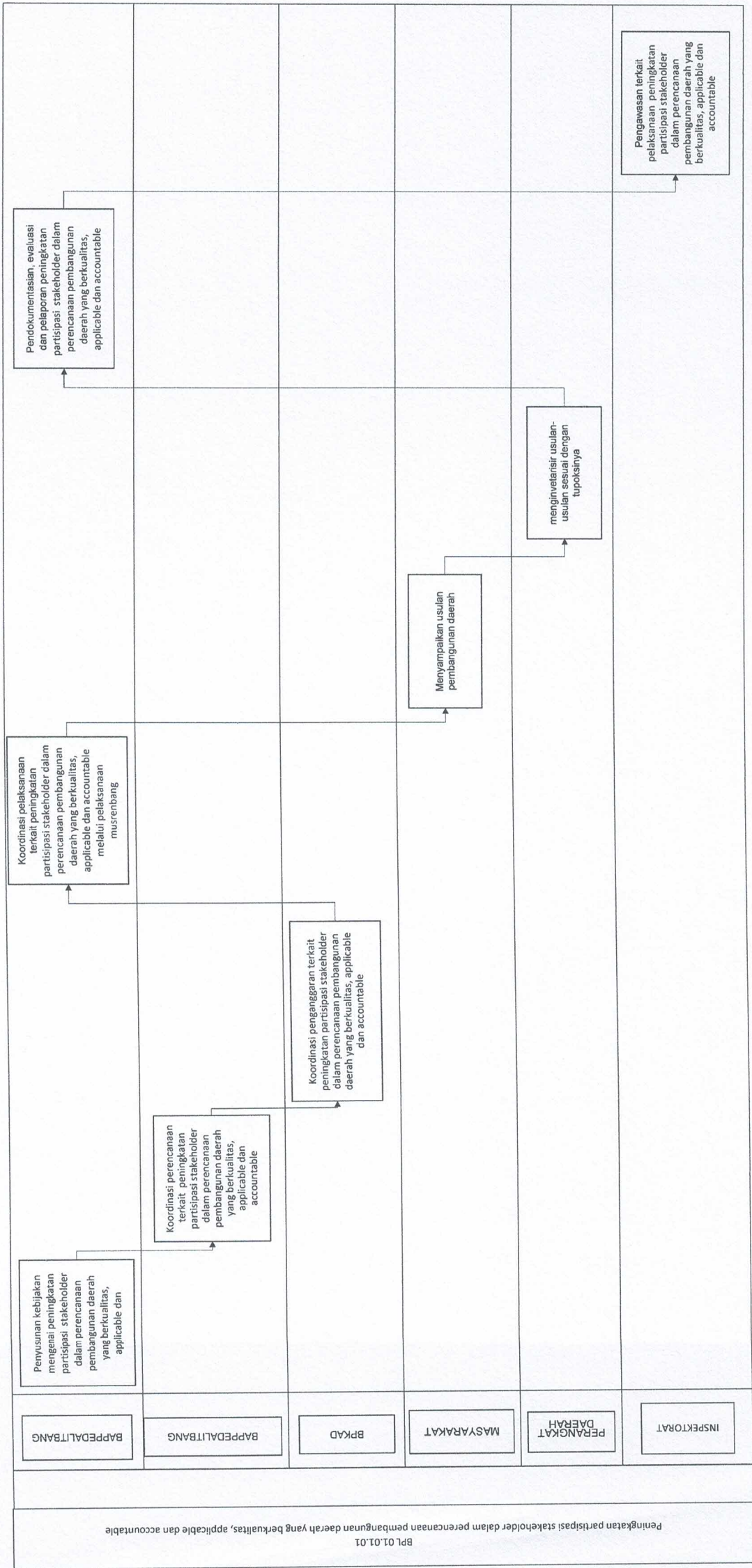
TABEL PETA RELASI PADA PETA PROSES BISNIS

PETA RELASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

<p><b>BPL 01</b> Terwujudnya konsistensi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah serta efektivitas pembangunan</p>	Sekretariat Daerah	Sekretariat DPRD	BPKAD	BAKESBANGPOL	DISPERIKOP UMKM	DISKOPAR	DISNAKER	Dinas Perhubungan	Dinas Pengendalian	Dinas Lingkungan	DINSOS PM	DPUPR	Dinas Kelapang dan Pertanian	RSUD	Kecamatan	Inspektorat
<p><b>BPL 02</b> Meningkatkan hasil kelibangan didalam kebijakan perencanaan pembangunan daerah</p>	Sekretariat Daerah	Sekretariat DPRD	BPKAD	BAKESBANGPOL	DISPERIKOP UMKM	DISKOPAR	DISNAKER	Dinas Perhubungan	Dinas Pengendalian	Dinas Lingkungan	DINSOS PM	DPUPR	Dinas Kelapang dan Pertanian	RSUD	Kecamatan	Inspektorat
<p><b>BPL 03</b> Meningkatkan kualitas SDM Perencanaan Bappedalitbang</p>	BKPSDM	Inspektorat	BPKAD	Bank Riau	Bappenas											
<p><b>BPL 04</b> Terpenuhinya Sarana dan Prasarana di lingkungan Bappedalitbang</p>	Inspektorat	BPKAD														

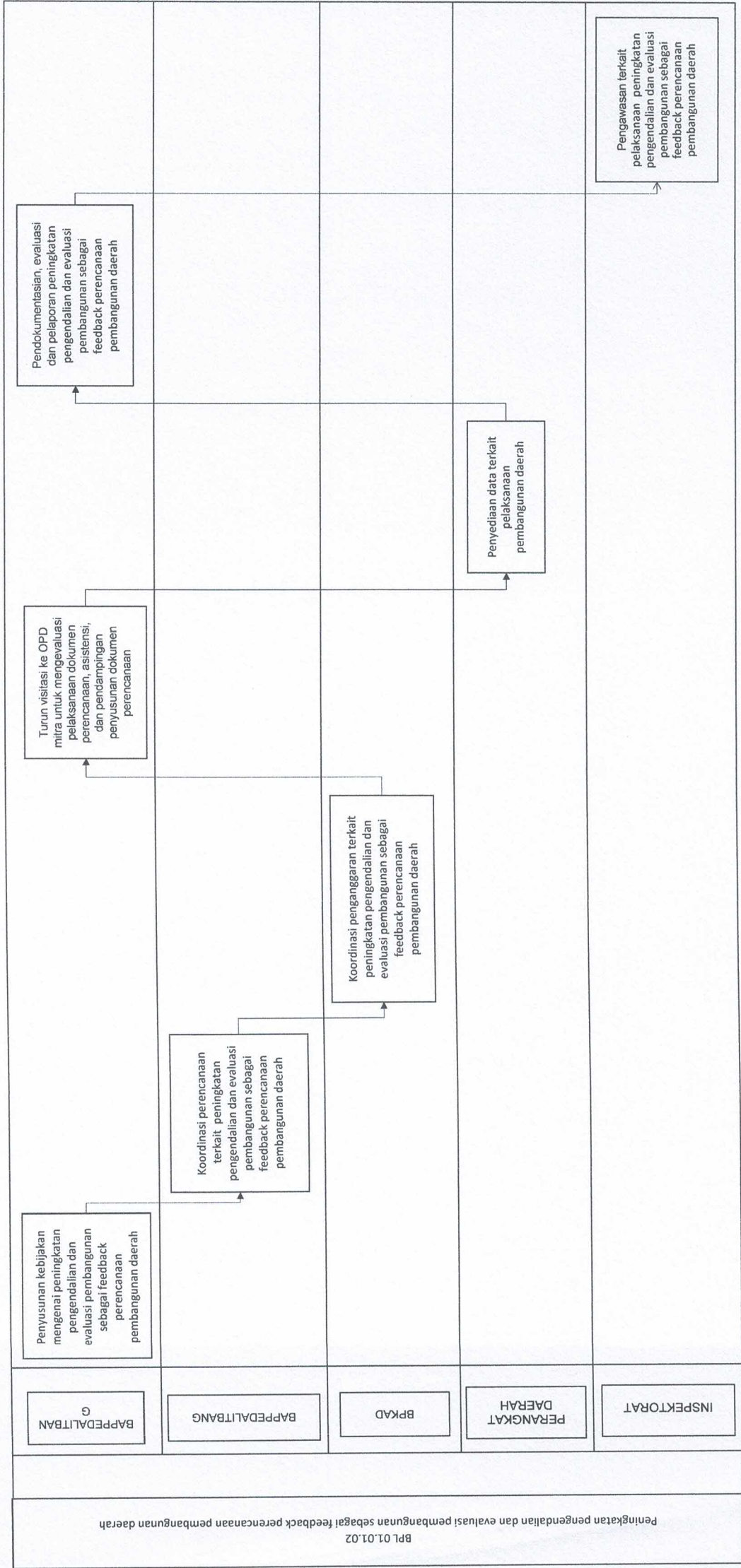
PETA LINTAS FUNGSI

BPL 01.01.01  
Peningkatan partisipasi stakeholder dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, applicable dan accountable



PETA LINTAS FUNGSI

BPL 01.01.02 Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai feedback perencanaan pembangunan daerah

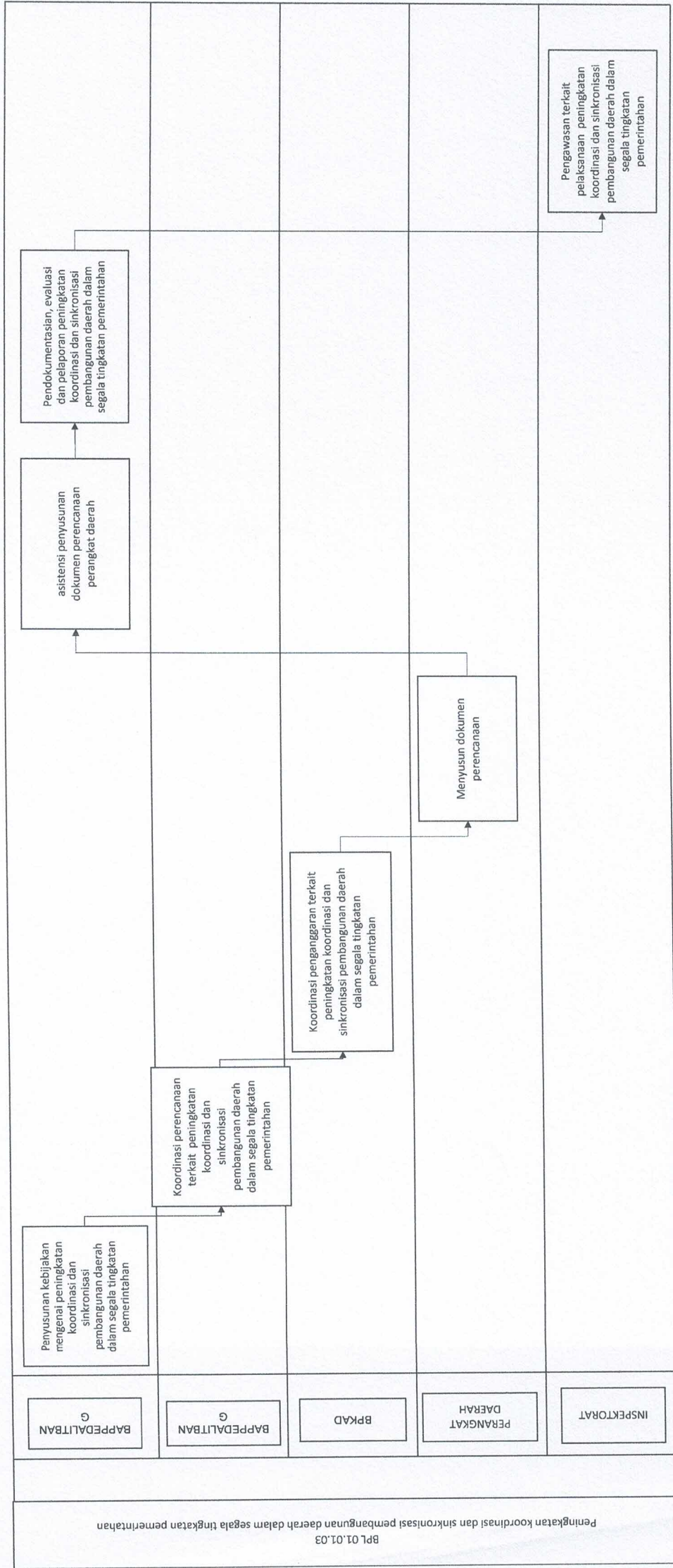


Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai feedback perencanaan pembangunan daerah

BPL 01.01.02

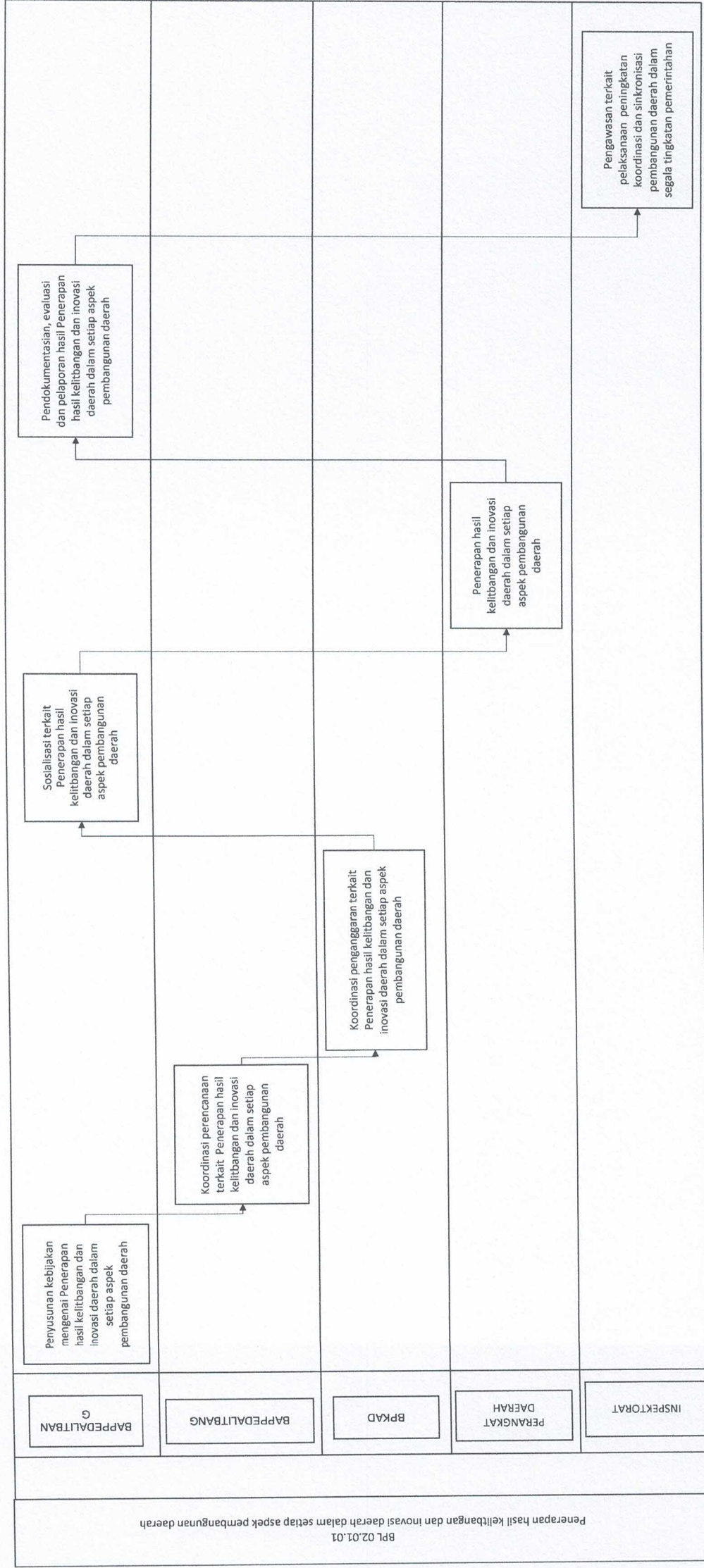
**PETA LINTAS FUNGSI**

**BPL 01.01.03**  
Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan daerah dalam segala tingkatan pemerintahan



PETA LINTAS FUNGSI

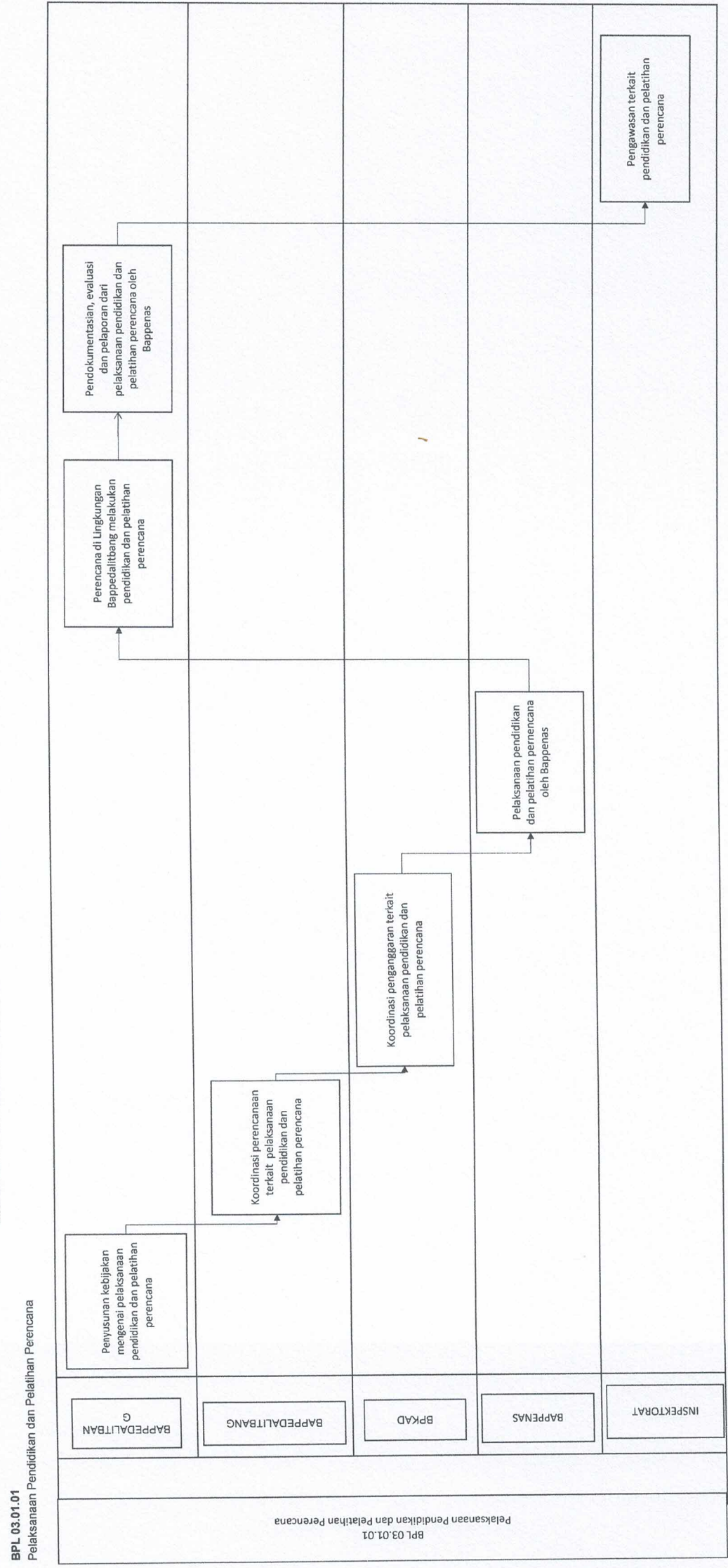
BPL 02.01.01  
Penerapan hasil kelibangan dan inovasi daerah dalam setiap aspek pembangunan daerah



Penerapan hasil kelibangan dan inovasi daerah dalam setiap aspek pembangunan daerah

BPL 02.01.01

# PETA LINTAS FUNGSI



BPL 03.01.01  
Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana

BPL 03.01.01  
Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana

BAPPEDALUTBAN  
G

BAPPEDALTBANG

BPKAD

BAPPENAS

INSPEKTORAT

Penyusunan kebijakan mengenai pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perencana

Koordinasi perencanaan terkait pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perencana

Koordinasi penganggaran terkait pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perencana

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perencana oleh Bappenas

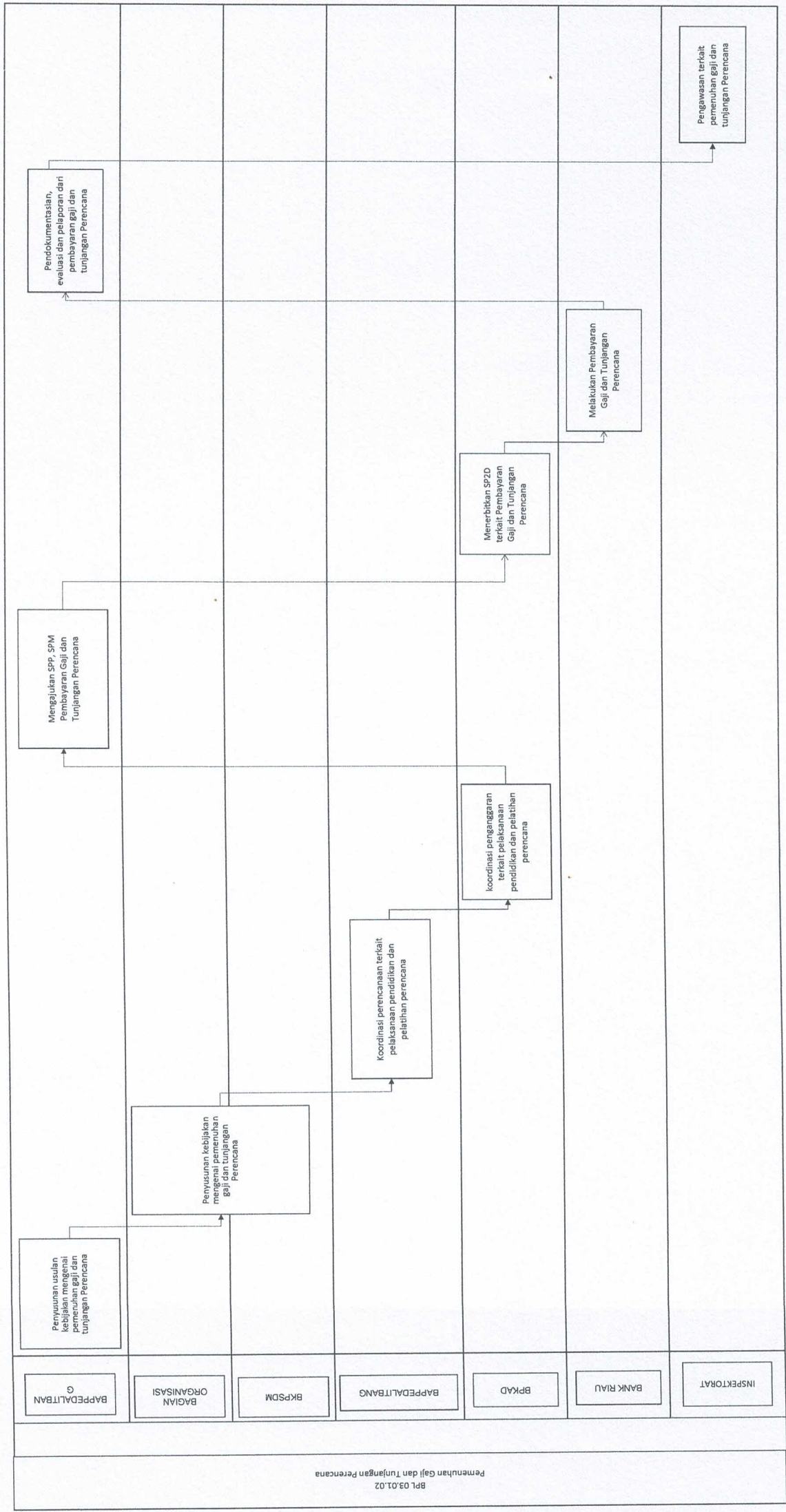
Pengkawasan terkait pendidikan dan pelatihan perencana

Perencana di Lingkungan Bappedalutbang melakukan pendidikan dan pelatihan perencana

Pendokumentasian, evaluasi dan pelaporan dari pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perencana oleh Bappenas

PETA LINTAS FUNGSI

BPL 03.01.02  
Pemenuhan Gaji dan Tunjangan Perencana

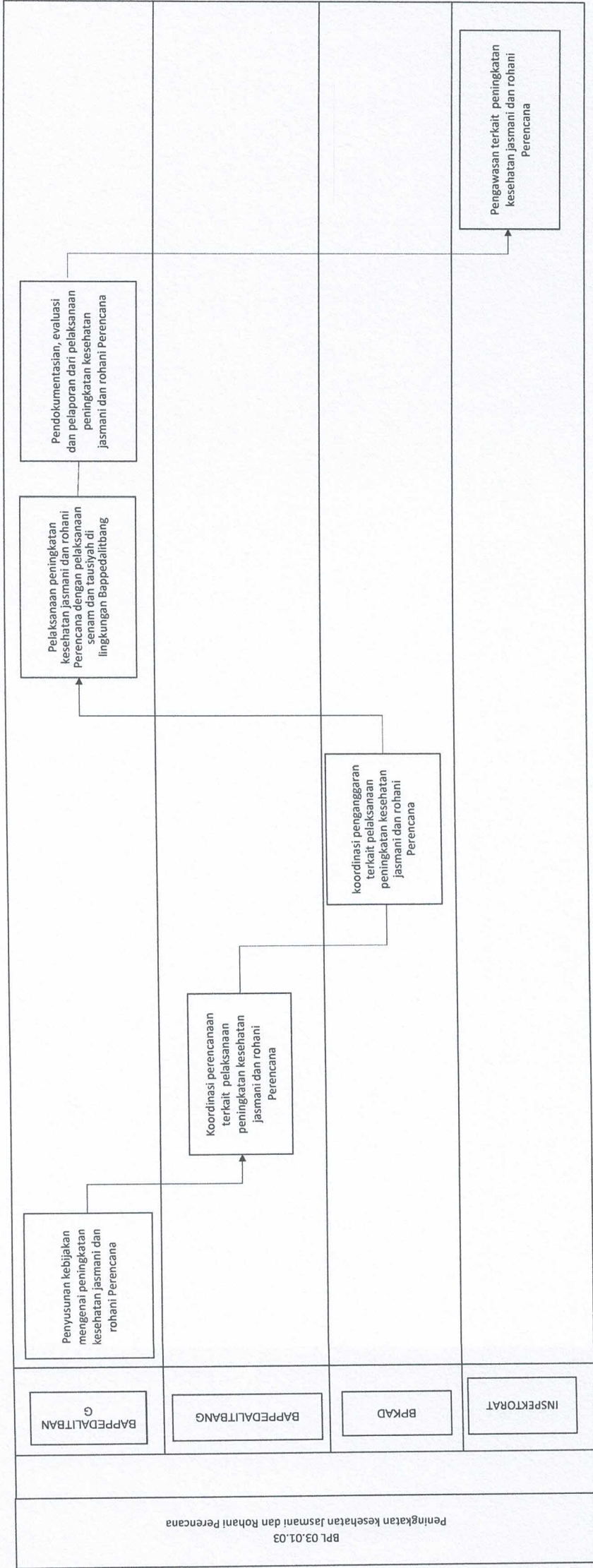


BPL 03.01.02  
Pemenuhan Gaji dan Tunjangan Perencana

BAPPEDALITBAN  
BAGIAN ORGANISASI  
BKPSDM  
BAPPEDALITBANG  
BPKAD  
BANK RIAU  
INSPEKTORAT

# PETA LINTAS FUNGSI

BPL 03.01.03  
Peningkatan kesehatan Jasmani dan Rohani Perencana



Peningkatan kesehatan Jasmani dan Rohani Perencana

BPL 03.01.03

BAPPEDALITBAN<sup>G</sup>

BAPPEDALITBANG

BPKAD

INSPEKTORAT

Pendokumentasian, evaluasi dan pelaporan dari pelaksanaan peningkatan kesehatan jasmani dan rohani Perencana

Pelaksanaan peningkatan kesehatan jasmani dan rohani Perencana dengan pelaksanaan senam dan tausiyah di lingkungan Bappedalitbang

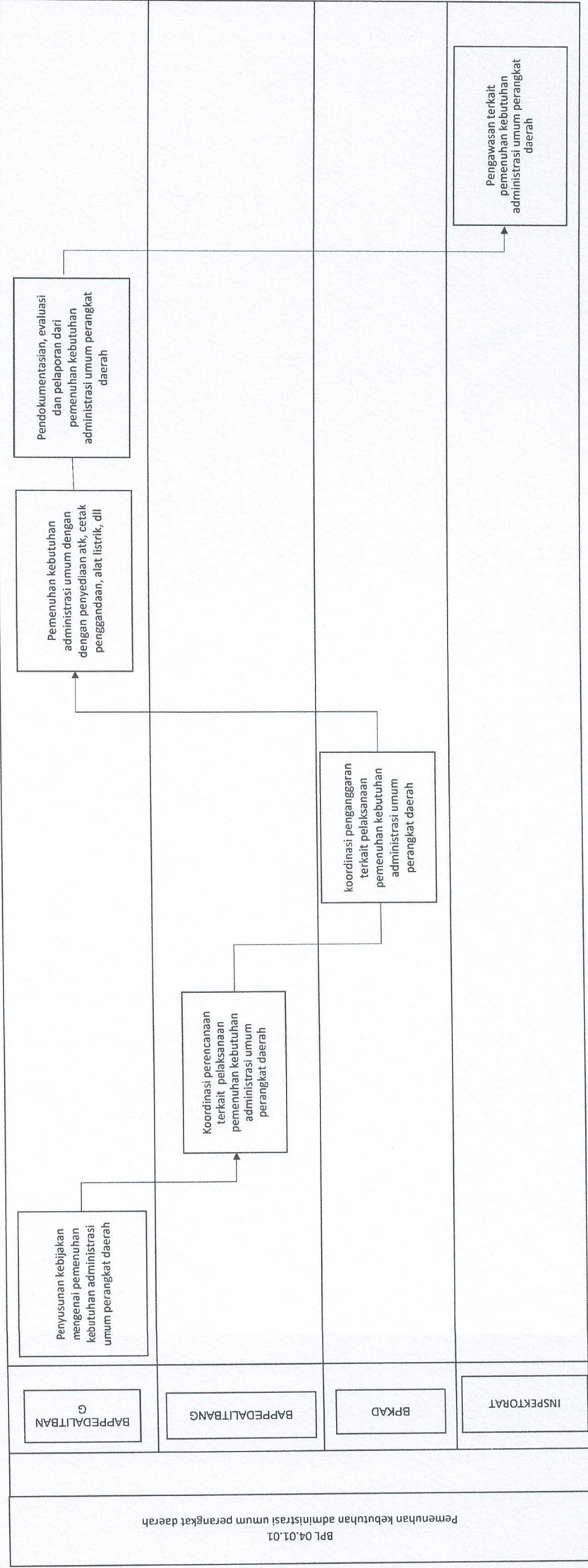
Koordinasi perencanaan terkait pelaksanaan peningkatan kesehatan jasmani dan rohani Perencana

koordinasi penganggaran terkait pelaksanaan peningkatan kesehatan jasmani dan rohani Perencana

Pengawasan terkait peningkatan kesehatan jasmani dan rohani Perencana

# PETA LINTAS FUNGSI

BPL 04.01.01  
Pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah



BAPDALITBAN G

BAPDALITBAN G

BPKAD

INSPEKTORAT

Penyusunan kebijakan mengenai pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah

Koordinasi perencanaan terkait pelaksanaan pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah

koordinasi penganggaran terkait pelaksanaan pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah

Pemenuhan kebutuhan administrasi umum dengan penyediaan atk, cetak penggandaan, alat listrik, dll

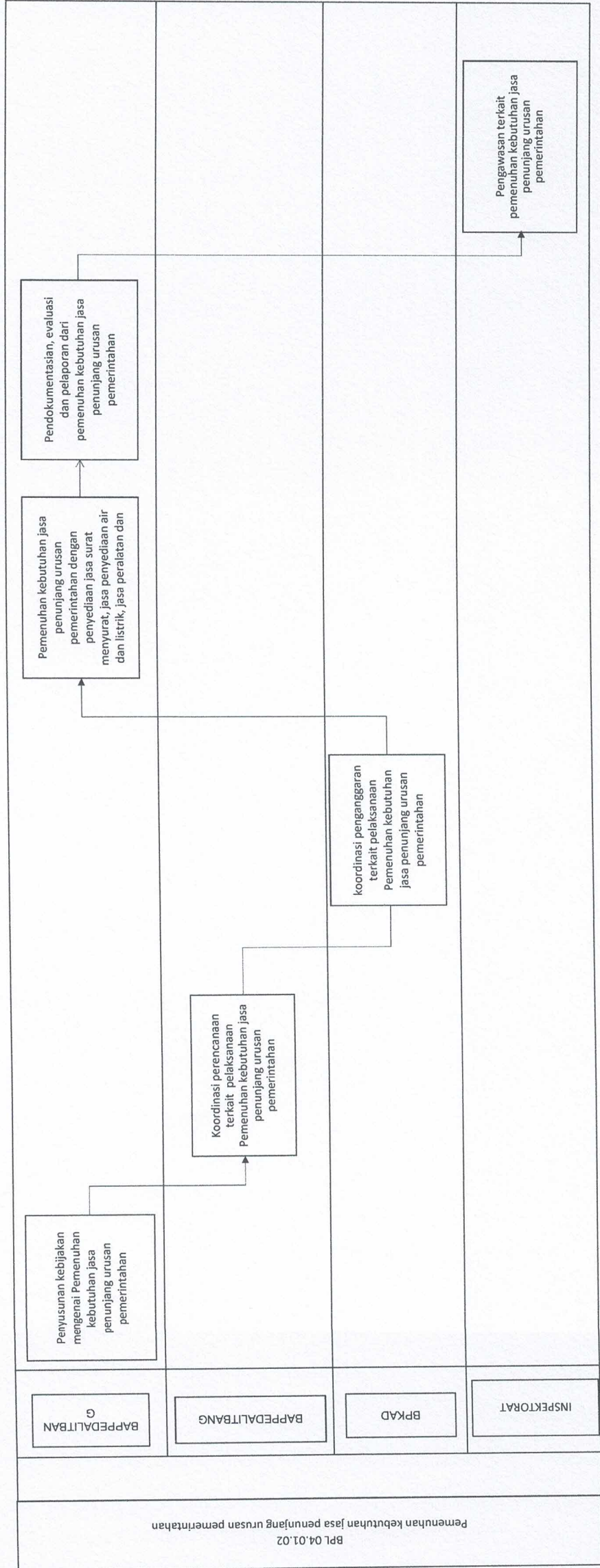
Pendokumentasian, evaluasi dan pelaporan dari pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah

Pengawasan terkait pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah

BPL 04.01.01  
Pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah

PETA LINTAS FUNGSI

BPL 04.01.02  
 Pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan

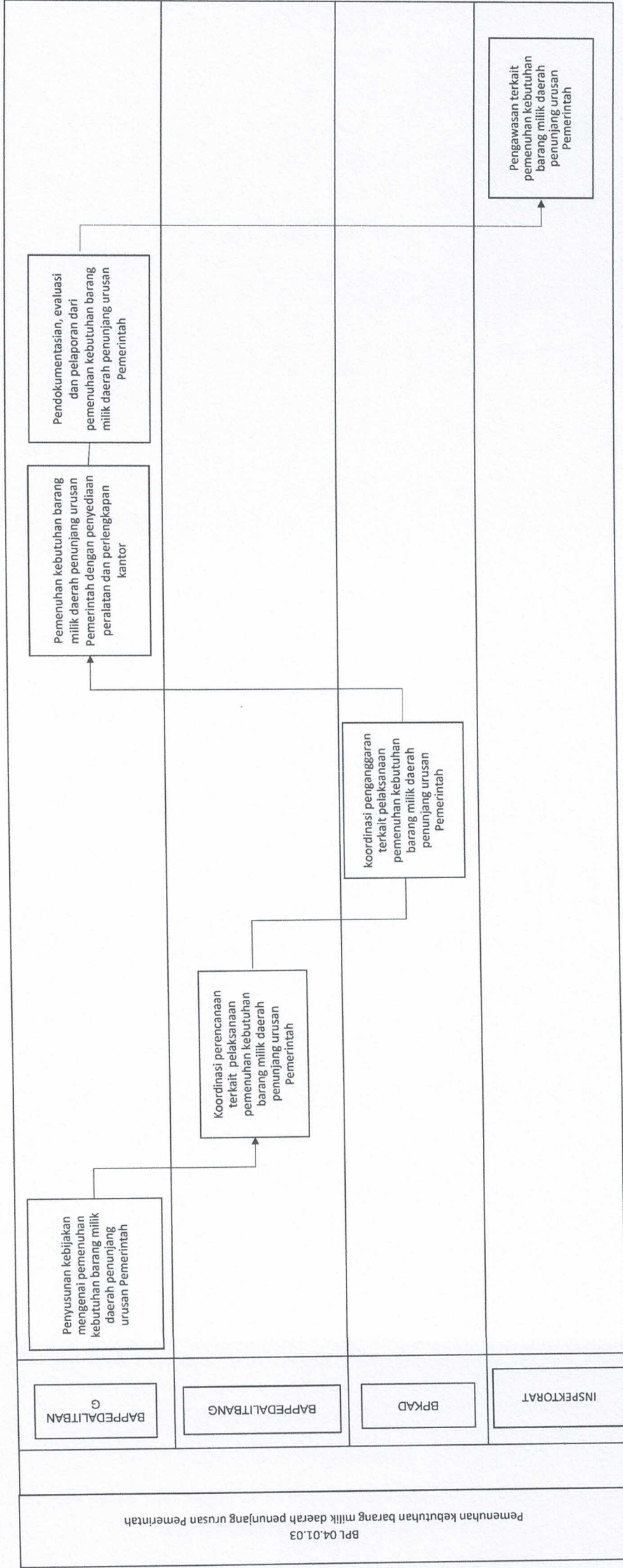


BPL 04.01.02  
 Pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan

PETA LINTAS FUNGSI

BPL 04.01.03

Pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah



Pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah

BPL 04.01.03